

## Pendidikan Sekolah Inklusif dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor

**Ara Annisa Almi\***, **Akhmad Yassir Makarim**, **Utari Akhir Gusti**

<sup>1,2</sup>Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

Corresponding author: [arannisalmii@gmail.com](mailto:arannisalmii@gmail.com)

**Kata Kunci:**  
Pendidikan,  
Inklusif,  
Kurikulum.

**Abstract:** *Education is a right that must be obtained by everyone. In fact, the main challenge facing the world of education today is the extent to which it can recognize and address the various needs of the entire student population, including those with special needs. Students classified as having special needs have the same rights as every other citizen. Therefore, the government initiated the Inclusive Education program as a solution to anxiety about this group so that it becomes a focused effort to overcome barriers to learning and participation. The research method used is descriptive qualitative with data sources coming from observation, interviews and literature study. The approach used by schools with the Natural Curriculum in Bogor Regency consists of approaches from school principals, educators and especially parents. All three have a strong influence on the development of children with special needs. The world of education should not only focus on ordinary education, it should also focus on initiatives for curricula that are relevant to society's needs and offer wider opportunities. Natural schools in Bogor Regency are a solution that can be used by teachers.*

**Abstrak:** Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh semua orang. Faktanya, tantangan utama yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah sejauh mana dapat mengenali dan mengatasi berbagai macam kebutuhan seluruh populasi peserta didik, tidak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Peserta didik yang tergolong berkebutuhan khusus memperoleh hak yang sama dengan setiap warga negara lainnya. Maka dari itu, pemerintah menginisiasi program Pendidikan Inklusif sebagai solusi terhadap kecemasan tentang suatu kelompok ini sehingga menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berpartisipasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor terdiri dari pendekatan dari kepala sekolah, pendidik dan terutama orang tua. Ketiganya memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan anak ABK. Dunia pendidikan tidak hanya fokus pada pendidikan biasa, juga seharusnya pada inisiatif terhadap kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menawarkan kesempatan yang lebih luas. Sekolah alam di Kabupaten Bogor menjadi solusi yang dapat digunakan oleh guru.

---

*Cara mensitasi artikel:*

Almi, Ara Annisa. et.al. (2024). Pendidikan Sekolah Inklusif dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 27-43.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

## Pendahuluan

Data *World Health Organization* (WHO) bahwa jumlah penyandang autis terus meningkat. Penyandang autisme diperkirakan berjumlah sekitar 4-6 per 10.000 kelahiran dan meningkat drastis pada tahun 2000 yaitu sekitar 60 per 10.000 kelahiran (Sutadi, 2012). Menurut *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) melaporkan pada tahun 2011, terdapat 35 juta orang penyandang autisme di seluruh dunia. Rata-rata 6 dari 1000 orang di dunia telah mengidap autisme. *The Center for Disease Control* (CDC) pada tahun 2000-2001 telah melaporkan di Amerika Serikat yang penyandang autisme lebih dari 15.000 anak-anak berusia 3-5 tahun dan lebih dari 78.000 anak-anak berusia 6-21 tahun (Yuwono, 2012).

Di Indonesia diperkirakan jumlah autis setiap tahunnya akan mengalami peningkatan sebesar 5%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 jumlah penderita autis diperkirakan mencapai 2,4 juta orang. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti tercantum di dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Bab III ayat 5 Undang-Undang (UU) No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus selanjutnya disebut ABK berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya dalam pendidikan (UU Sistem Pendidikan Nasional, 1989).

Peserta didik yang tergolong berkebutuhan khusus memperoleh hak yang sama dengan setiap warga negara lainnya. Regulasi Pendidikan yang tertuang di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari usaha peningkatan kualitas dari peserta didik (Warman & Gusti, 2022).

Passal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menganalisis pendidikan inklusif sekolah alam di Kabupaten Bogor sekaligus melakukan edukasi kepada guru. Sekolah alam adalah pemanfaatan lingkungan sebagai tempat belajar. Lingkungan tidak hanya sebagai tempat tinggal bahkan mampu menjadi objek dalam pembelajaran (Gusti dkk, 2020; Rismawati dkk, 2022). Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan dari sekolah alam di Kabupaten Bogor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka tujuan pengabdian yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada guru mengenai pendidikan inklusif sekaligus menganalisis kesesuaian sekolah alam di kabupaten Bogor.

Menurut UNESCO (2005), pendidikan inklusif adalah pendekatan yang berupaya menjamin akses pendidikan bagi semua siswa tanpa terkecuali, dengan mengakui dan menghargai keragaman. Hal ini sejalan dengan prinsip *Universal Design for Learning (UDL)* yang dipopulerkan oleh CAST (2018), yang menekankan pentingnya menyediakan berbagai cara untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Penelitian oleh Darling-Hammond et al., (2017) menunjukkan bahwa pelatihan guru yang berbasis praktik dan berfokus pada pengembangan keterampilan konkret dalam pengajaran inklusif dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Metode pelatihan yang menggunakan diskusi, studi kasus, dan simulasi, seperti yang diterapkan dalam pengabdian ini, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep pendidikan inklusif di kelas. Penelitian oleh Sukardi (2019) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah dengan pendekatan non-kontekstual, seperti sekolah alam, dapat menerapkan pendidikan inklusif dengan lebih fleksibel dan adaptif. Sekolah yang menerapkan model pembelajaran berbasis lingkungan cenderung lebih mudah mengakomodasi keragaman siswa, karena mereka sering menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual.

Menurut Epstein (2018), keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dengan melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan pelatihan pendidikan inklusif, pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi siswa berkebutuhan khusus, yang selaras dengan temuan bahwa dukungan dari komunitas dapat meningkatkan partisipasi dan keberhasilan siswa. Ainscow dan Miles (2008) mengemukakan bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak hanya menguntungkan siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial dan

toleransi di antara semua siswa. Ini menunjukkan pentingnya mengedukasi semua anggota komunitas pendidikan mengenai nilai-nilai inklusi dan keberagaman. Manfaat penelitian ini memberikan edukasi kepada guru di sekolah alam sekaligus menganalisis kesesuaian sekolah alam di kabupaten Bogor yang dapat memberikan pedoman sekaligus panduan dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

## Metode Pengabdian

Lokasi pengabdian yang dilaksanakan berada di sekolah alam kabupaten Bogor. Peserta pengabdian terdiri dari guru dan kepala sekolah. Pengabdian yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada guru dan kepala sekolah di sekolah alam Kabupaten Bogor. Guru dan kepala sekolah diberikan pengetahuan mengenai pendidikan inklusif setelah itu akan dilakukan analisis apakah sekolah alam di Kabupaten Bogor memenuhi atau belum. Adapun tahapan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan sebagai berikut.

### 1. Perencanaan

Tahap perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting untuk menjamin kesuksesan pengabdian ini. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi:

- a. Identifikasi Permasalahan dan Tujuan Pengabdian: Pertama, dilakukan identifikasi bahwa masih ada kesenjangan pemahaman dan penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Alam Kabupaten Bogor. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada guru dan kepala sekolah mengenai konsep dan implementasi pendidikan inklusif, serta menganalisis kelayakan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif.
- b. Studi Literatur dan Kebijakan: Tim pengabdian melakukan penelitian awal mengenai pendidikan inklusif, kebijakan pemerintah yang terkait, serta metode dan pendekatan pendidikan inklusif yang sesuai untuk Sekolah Alam. Hal ini penting untuk menyesuaikan materi sosialisasi dengan kebutuhan lokal sekolah.
- c. Pemetaan Sekolah dan Peserta: Tim melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang akan menjadi sasaran pengabdian, termasuk mengidentifikasi guru dan kepala sekolah yang akan menjadi peserta. Penentuan sekolah didasarkan pada wilayah, potensi, serta kesiapan sekolah dalam menerima sosialisasi terkait pendidikan inklusif.
- d. Penyusunan Materi Sosialisasi: Tim penyusun mempersiapkan materi sosialisasi yang meliputi definisi pendidikan inklusif, prinsip-prinsip dasar, strategi penerapannya di sekolah, serta studi kasus sukses penerapan pendidikan inklusif di sekolah lainnya. Materi juga dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi langsung di kelas.
- e. Pengaturan Jadwal dan Logistik: Setelah materi selesai disusun, dilakukan pengaturan waktu pelaksanaan sosialisasi, serta pemilihan tempat, alat dan

bahan yang diperlukan. Semua kegiatan dikoordinasikan dengan pihak sekolah agar pelaksanaan berjalan lancar.

## 2. Persiapan

Pada tahap persiapan, fokus utama adalah memastikan segala kebutuhan teknis dan administratif siap untuk pelaksanaan kegiatan. Kegiatan persiapan meliputi:

- a. Koordinasi dengan Sekolah dan Pihak Terkait: Tim pengabdian melakukan komunikasi intensif dengan pihak sekolah untuk memastikan persiapan tempat, peserta (guru dan kepala sekolah), serta alat bantu yang diperlukan, seperti proyektor, materi cetak, dan alat tulis.
- b. Pelatihan Internal Tim Pengabdian: Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian menjalani pelatihan internal untuk memastikan setiap anggota memahami peran dan tugas masing-masing selama sosialisasi. Ini juga mencakup simulasi penyampaian materi agar lebih efektif dan komunikatif.
- c. Penyiapan Instrumen Evaluasi: Instrumen evaluasi disiapkan untuk menganalisis apakah sekolah alam di Kabupaten Bogor memenuhi standar pendidikan inklusif atau belum. Instrumen ini mencakup kuesioner, wawancara, serta observasi lapangan yang dirancang untuk menilai kesiapan sekolah dalam aspek fasilitas, SDM, dan kebijakan sekolah terhadap pendidikan inklusif.

## 3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian. Sosialisasi dan pengumpulan data dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Materi Sosialisasi: Sosialisasi dimulai dengan pengantar tentang pentingnya pendidikan inklusif, diikuti dengan pemaparan materi yang telah disusun. Materi disampaikan dalam bentuk presentasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Guru dan kepala sekolah diajak untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan pendapat dan berbagi pengalaman mereka.
- b. Diskusi Kelompok dan Studi Kasus: Setelah penyampaian materi, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas studi kasus penerapan pendidikan inklusif. Diskusi ini bertujuan untuk membantu peserta memahami bagaimana pendidikan inklusif dapat diterapkan di lingkungan sekolah alam mereka.
- c. Pengumpulan Data untuk Analisis: Setelah sesi sosialisasi selesai, tim pengabdian melakukan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara dengan guru dan kepala sekolah. Pengamatan terhadap kondisi fisik sekolah juga dilakukan untuk menilai apakah fasilitas yang ada mendukung pendidikan inklusif, misalnya aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
- d. Observasi Langsung di Kelas: Tim melakukan observasi ke beberapa kelas untuk melihat bagaimana guru mengajar dan bagaimana interaksi antara siswa berlangsung. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif.

#### 4. Evaluasi

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sosialisasi dan hasil analisis kelayakan sekolah. Langkah-langkah evaluasi meliputi:

- a. Analisis Hasil Pengumpulan Data: Data yang diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan dianalisis untuk menentukan apakah sekolah-sekolah alam di Kabupaten Bogor sudah memenuhi syarat untuk menerapkan pendidikan inklusif. Aspek yang dianalisis meliputi kesiapan guru, kebijakan sekolah, serta fasilitas pendukung.
- b. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi: Berdasarkan analisis, tim pengabdian menyusun laporan evaluasi yang mencakup kesimpulan tentang tingkat pemahaman guru dan kepala sekolah mengenai pendidikan inklusif, serta rekomendasi untuk perbaikan atau langkah-langkah yang harus diambil agar sekolah alam siap menerapkan pendidikan inklusif.
- c. Tindak Lanjut: Sebagai bagian dari evaluasi, disusun rencana tindak lanjut, seperti pelatihan lanjutan, bimbingan teknis, atau konsultasi lebih lanjut jika diperlukan. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan pendidikan inklusif benar-benar terwujud di sekolah alam di Kabupaten Bogor.
- d. Refleksi: Tim pengabdian juga melakukan refleksi internal untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan pengabdian ini. Hasil refleksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan pengabdian di masa depan.

Keterlibatan masyarakat, terutama guru dan kepala sekolah, dalam pengabdian ini sangat penting di setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mereka berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, membantu menyusun materi, serta mengatur logistik pelaksanaan sosialisasi. Partisipasi mereka juga terlihat dalam pelaksanaan sosialisasi melalui diskusi dan studi kasus, serta pengumpulan data yang memberikan gambaran nyata tentang kesiapan sekolah menerapkan pendidikan inklusif. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan relevansi program, tetapi juga memperkuat pemahaman dan komitmen mereka terhadap penerapan pendidikan inklusif, sehingga hasil pengabdian lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal.

Dalam pelaksanaan pengabdian di Sekolah Alam Kabupaten Bogor, berbagai alat dan bahan digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi pendidikan inklusif. Proyektor dan laptop digunakan untuk menyajikan presentasi visual yang memperjelas penyampaian materi kepada guru dan kepala sekolah. Papan tulis dan alat tulis digunakan dalam diskusi kelompok untuk mencatat ide-ide penting, sementara handout dan slide presentasi diberikan untuk memudahkan peserta mengikuti alur materi.

Selama pengabdian di Sekolah Alam Kabupaten Bogor, data dikumpulkan menggunakan beberapa metode untuk mengevaluasi kesiapan sekolah dalam

menerapkan pendidikan inklusif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara yang dibagikan kepada guru dan kepala sekolah untuk mengukur pemahaman mereka tentang pendidikan inklusif serta wawancara terstruktur yang mendalamai tantangan dan kebutuhan mereka. Selain itu, dilakukan observasi langsung di kelas untuk melihat interaksi antara guru dan siswa, serta menilai fasilitas fisik yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sekolah dan guru dipilih berdasarkan relevansi mereka dengan topik pendidikan inklusif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis untuk menemukan tema utama dan pola terkait kesiapan sekolah. Hasil dari analisis ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi dan tindak lanjut.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Sekolah Inklusif**

#### **1. Pengertian Sekolah Inklusif**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian dari Pendidikan sebagaimana dalam Permendiknas di atas memberikan penjelasan secara rinci mengenai siapa saja yang dapat dimasukkan dalam pendidikan inklusi. Perincian yang diberikan pemerintah ini dapat di pahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua pesera didik dari yang normal, memiliki kelainan, dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. Dengan demikian pemerintah mulai mengubah model pendidikan yang selama ini memisahkan-misahkan.

Di sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor belum melakukan hal yang serupa dengan memisahkan anak ABK dan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Untuk akses sekolah yang menerima tidak berkebutuhan khusus ditambah ABK sejauh ini baru sekolah swasta. Sedangkan pada sekolah negeri hanya menerima ABK yang setelah diseleksi ternyata tergolong mampu mengikuti pembelajaran seperti anak-anak lainnya.

Untuk sekolah swasta dari keluarga tidak mampu akan sulit melakukan pembayaran. Apalagi jika sekolah mewajibkan menggunakan shadow teacher biaya yang ditanggung akan lebih banyak lagi. Shadow Teacher adalah guru bantu yang mendampingi anak ABK dalam pembelajaran di sekolah. Di sekolah dengan

Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor mendorong ABK yang masih mampu untuk digabung dengan anak lainnya untuk tidak menggunakan shadow teacher dan dari orang tua kebanyakan juga tidak ingin menggunakan shadow teacher.

Selain karena biayanya lebih mahal, orang tua juga ingin anaknya dianggap normal. Hal ini kembali kepada kerjasama pihak sekolah dan orang tua sang anak ABK. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusi dipengaruhi oleh keberhasilan dari berbagai komponen dan semua pihak yang terlibat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Giangreco (2013) sekolah juga harus bekerjasama dengan komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orangtua, siswa, tim administratif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru.

Menurut Budiyanto (2009:13) mengatakan bahwa guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, harus ada kerjasama dengan komponen lain misalnya adanya manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen sekolah dalam setting inklusif menurut Marthan, (2007: 145) yaitu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual.

Hal tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Peserta didik normal ke dalam sekolah regular, peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan bakat istimewa ke dalam sekolah (kelas) akselerasi, dan peserta didik dengan kelainan ke dalam Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurut MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat. Pendapat Baihaqi dan Sugiarmin di atas, menekankan bahwa setiap siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan tepat, tanpa adanya membeda-bedakan perkembangan individu, sosial, dan intelektual.

Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan perlu merancang sebuah konsep pendidikan yang mengakomodir perbedaan-perbedaan individu tersebut. Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian dari pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah regular sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Pendapat Daniel P. Hallahan di atas memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menempatkan semua peserta didik dalam sebuah sekolah regular maka dalam hal ini peran guru sangat diharapkan bertanggung jawab terhadap proses

pendidikan dan pengajaran tanpa membedakan kondisi anak. Pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa peserta didik dalam pendidikan inklusif terdiri atas peserta didik pada umumnya yaitu peserta didik tanpa berkebutuhan khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Peserta didik berkebutuhan khusus meliputi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Dengan demikian peserta didik dalam pendidikan inklusif meliputi seluruh peserta didik tanpa terkecuali, baik peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik tanpa berkebutuhan khusus. ABK ini ada dua kelompok, yaitu: ABK temporer (sementara) dan permanen (tetap). Adapun yang termasuk kategori ABK temporer meliputi: anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan (anjal), anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV-AIDS. Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, Autis, ADHD (Attention Deficiency and Hiperactivity Disorders), Anak Berkesulitan Belajar, Anak berbakat dan sangat cerdas (Gifted), dan lain-lain. Pembagian ABK, lebih jelasnya yakni:

1. Peserta didik dengan hambatan penglihatan/ Tunanetra;
2. Peserta didik dengan hambatan pendengaran/ Tunarungu;
3. Peserta didik dengan hambatan intelektual/Tunagrahita;
4. Peserta didik dengan hambatan fisik motorik/ Tunadaksa;
5. Peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku;
6. Peserta didik lamban belajar (slow learner);
7. Peserta didik berkesulitan belajar spesifik (specific learning disability);
8. Peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa;
9. Peserta didik Autistic Spectrum Disorders (ASD); dan
10. Peserta didik Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Menurut Susanto, banyak di antara anak-anak yang dalam perkembangannya baik aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, moral-agama, dan seni atau gabungan dari beberapa aspek tersebut mengalami gangguan, hambatan, keterlambatan, atau mengalami faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan yang optimal diperlukan penanganan khusus (Susanto, 2011). Anak yang mengalami hal demikianlah yang kemudian dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan inklusi penting dalam memberikan pendidikan yang bermutu pada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang.

**2. Kondisi Pendidikan Inklusif Sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor**

Dalam budaya dan konteks yang berbeda, nilai-nilai tertentu lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Di semua masyarakat, orang-orang tertentu akan berpegang lebih teguh dan bertindak atas dasar nilai-nilai ini dibandingkan dengan orang lainnya. Pendekatan yang digunakan sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor terdiri dari pendekatan dari Kepala Sekolah, Pendidik dan terutama orang tua. Rao (2007) menjelaskan bahwa suatu sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik bergantung pada beberapa faktor, seperti pendidik, peserta didik, kurikulum dan fasilitas.

Dari beberapa faktor tersebut pendidik merupakan faktor yang paling penting dan merupakan poros utama dari seluruh struktur pendidikan. dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pelaksanaan Sekolah Inklusi di sekolah-sekolah biasanya menemui hambatan diantaranya pelaksanaan program-program pendidikan inklusi di sekolah sehingga tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktik terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, kurikulum, serta tenaga kependidikan dan pembelajarannya. Seorang pendidik harus mampu menggunakan pendekatan yang mampu mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa menyulitkan peserta didik dengan berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Guru SLB memiliki peranan kerja yang tidak hanya dituntut untuk mengajarkan sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang selaras dengan potensi dan karakteristik peserta didiknya, melainkan juga harus mampu bertindak seperti paramedis, terapis, social worker, konselor dan administrator (Efendi, 2005). Di sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor dalam menyalurkan tenaga pendidik, terdapat dua sistem: Penggunaan Shadow Teacher (1 guru untuk 1 peserta didik) kepada peserta didik yang sulit diatasi jika harus dikontrol oleh Wali Kelas. Dalam hal ini sang orang tua anak diharuskan membayar lebih untuk jasa ini. Tidak Menggunakan Shadow Teacher kepada peserta didik yang bisa langsung diurus oleh Wali Kelas. Maksimal terdapat dua peserta didik yang tidak menggunakan Shadow Teacher di kelas.

Selain itu, dukungan emosional keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat serta membantu penguasaan emosi seperti adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan (Quratta, 2020). Orang tua berperan besar dalam mengatasi anaknya sendiri. Penulis masih mendapati beberapa orang tua dengan latar belakang Psikolog yang tidak jujur dengan konsisi anaknya pada proses interview. Di sekolah lainnya, anak ABK yang ingin didaftarkan namun ibunya bekerja, maka pihak sekolah akan meminta sang ibu untuk resign dari pekerjaannya. Hal ini kembali ke peran orang tua yang paling dominan sebab akan sia-sia jika didikan tidak diteruskan di rumah. Terdapat kasus dimana seorang anak ABK ditanyakan, apakah disuruh belajar di rumah? Apakah disuruh ibadah di rumah? Dan anak tersebut menjawab “Tidak.”, karena faktanya memang hal itu tidak diajarkan di rumah.

Alur pendaftaran peserta didik bisa juga melalui tahap interview yang biasa diterapkan di sekolah swasta dengan maksud mengetahui bagaimana cara ideal memperlakukan anak ABK serta capaian yang ingin disepakati pihak sekolah bersama orang tua. Misalkan terdapat orang tua yang hanya menargetkan anaknya untuk bisa disosialisasikan, ada yang menargetkan anaknya agar bisa mempunyai teman sepanteran, ada yang menargetkan anaknya harus hafiz Al-Qur'an minimal 2 juz, ada yang menargetkan anaknya harus pintar dalam menguasai materi, dan lain sebagainya. Di sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor, terdapat anak-anak dengan kategori, sebagai berikut:

1. Peserta didik dengan hambatan intelektual/Tunagrahita;
2. Peserta didik lamban belajar (slow learner);
3. Peserta didik berkesulitan belajar spesifik (specific learning disability);
4. Peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa;
5. Peserta didik Autistic Spectrum Disorders (ASD); dan
6. Peserta didik Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
7. Sedangkan untuk peserta didik dengan hambatan penglihatan/ Tunanetra, peserta didik dengan hambatan pendengaran/ Tunarungu, peserta didik dengan hambatan fisik motorik/ Tunadaksa, peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku tidak didaftarkan termasuk ke dalam kategori ABK di sekolah ini karena masih dianggap mampu menerima pelajaran seperti anak normal lainnya. Sebagai tambahan, seiring waktu peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa mulai bisa mengendalikan emosi.

Selain itu, beberapa kategori anak ABK lainnya mengalami perkembangan belajar karena adanya kerjasama dari orang tua sebagai pengasuh. Untuk pengalaman mengajar, penanganan paling sulit yaitu kepada anak tunagrahita. Sebab kenakalan anak-anak yang normal juga sama, seringkali anak tunagrahita yang digabung dengan anak lainnya terutama kelas kecil sering jadi sasaran buli dan aduan jika membalas buli dengan fisik. Atau anak lainnya akan melakukan apapun yang bisa membuat sang anak tunagrahita marah.

Biasanya upaya yang dilakukan pendidik, jika misalnya ada anak yang mengadukan si ABK maka akan ditelusuri alasan anak tersebut marah sampai menyakiti temannya. Beberapa kasus sudah sampai ke orang tua dan sudah coba diatasi dengan megumpulkan orang tua siswa normal untuk disosialisasikan tentang ada anak istimewa di kelas serta sudah memohon untuk anaknya diberitahukan untuk tidak memancing kemarahan anak istimewa ini atau dimaafkan saja jika anak istimewa yang memulai duluan dengan cara jika anak istimewa sudah memulai terlebih dahulu, maka guru yang mengatasinya.

Terdapat kasus sebelumnya yang mana jika di kelas ada anak tunagrahita, biasanya guru yang kebetulan sedang tidak mengajar atau jam kosong diminta untuk masuk ke kelas tersebut untuk memantau anak tunagrahita. Sedangkan guru

yang sedang mengajar bisa fokus mengkondisikan anak yg lain. Untuk hukuman dan apresiasi tidak dibedakan antara anak normal dan istimewa. Semua disamakan.

### **3. Pendidikan Inklusif di Sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor tidak Merdeka Belajar**

Pendekatan keseluruhan sekolah perlu dipergunakan untuk menangani semua aspek inklusi. Di daerah sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor, penilaian pembelajaran dilakukan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran berdasarkan prosedur dan alat penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Hamzah et al., 2020). Anak-anak ABK dengan kategori peserta didik dengan hambatan intelektual/Tunagrahita, peserta didik lamban belajar (slow learner), dan peserta didik Autistic Spectrum Disorders (ASD) diberikan rapot dengan nilai mendekati Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Khusus bagi ABK yang menggunakan Shadow Teacher, maka selain rapot juga akan mendapatkan Record Kemajuan berupa laporan dari Shadow Teacher yang bersangkutan. Sedangkan dalam RPP Merdeka Belajar mencakup identitas pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari alat dan bahan pembelajaran, pertanyaan, kesimpulan pembelajaran dan penilaian. Serta bagian penutup dilengkapi dengan tandatangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran.

Kemampuan peserta didik terlihat dengan adanya rekapitulasi dari penilaian pembelajaran. Guna mengetahui perkembangan pembelajaran anak berkebutuhan khusus maka dibutuhkan adanya proses asessmen. Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan Inklusif oleh Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan: Asesmen adalah tindakan untuk menemukan kondisi peserta didik, meliputi aspek potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik.

Asesmen dilakukan dalam rangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Secara khusus asesmen juga dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Merdeka belajar merupakan bagian dari berubahnya sistem pendidikan dan pengajaran.

Pemerintah dalam melakukan inovasi terhadap sistem pendidikan maka tentunya sistem pendidikan inklusif pun mesti diperhatikan. (Rizki Amalia & Ulva, 2020). Melalui Merdeka Belajar, sekolah dibebaskan dalam menentukan capaian belajar anak, namun untuk anak ABK tentu target capaiannya akan berbeda jauh. Misalnya saja, di Kelas ketika peserta didik yang lain diberikan tugas untuk membuat contoh Pengamalan Sumpah Pemuda, maka tugas berbeda yang kemudian diberikan kepada anak ABK. Dapat berupa tugas berlatih menulis huruf-huruf dengan benar.

Minimalnya, anak ABK ketika lulus dari sekolah memiliki kemampuan Baca Tulis Hitung (Calistung). Sepengetahuan penulis, pada panduan dari Kurikulum Merdeka Belajar masih sebatas aturan bahwa seluruh sekolah di Indonesia dilarang menolak anak ABK dan masih sebatas adaptasi anak ABK dengan anak lainnya. Terkait Kurikulum Merdeka Belajar mirip seperti Kurikulum Sekolah Alam yang pada dasarnya ramah anak inklusi.

Sekolah dengan Kurikulum Alam di Kabupaten Bogor sejak tahun 2018 sudah mengadopsi Kurikulum Sekolah Alam. Pendidikan ramah inklusi sejatinya ditujukan untuk mengubah sistem sekolah, bukan untuk memberi label kepada individu atau kelompok anak tertentu ataupun untuk mengubahnya. Ini dilakukan dengan merespon keberagaman, dengan mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelompok anak pada suatu kurikulum yang responsif.

#### **4. Pelaksanaan Pengabdian di Sekolah Alam Kabupaten Bogor**

Hasil dari pelaksanaan pengabdian di Sekolah Alam Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah menerima materi sosialisasi mengenai pendidikan inklusif dengan sangat baik. Melalui presentasi, diskusi kelompok, dan studi kasus yang disampaikan selama kegiatan, peserta tampak antusias dan aktif berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar guru dan kepala sekolah mengaku bahwa pengetahuan mereka tentang konsep pendidikan inklusif meningkat secara signifikan. Mereka kini lebih memahami prinsip-prinsip dasar inklusi, strategi mengajar yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa, serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif bagi semua siswa. Beberapa peserta bahkan menyatakan bahwa materi yang disampaikan telah membuka wawasan baru tentang bagaimana mengidentifikasi dan merespons kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di kelas. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menambah pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah.

Selain peningkatan pengetahuan, guru dan kepala sekolah juga menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam menerapkan konsep pendidikan inklusif di Sekolah Alam Kabupaten Bogor. Mereka merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan mengajar siswa dengan kebutuhan khusus dan menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung untuk semua siswa. Banyak dari mereka yang menyatakan akan mulai menerapkan strategi inklusif dalam kegiatan belajar-mengajar, seperti diferensiasi pengajaran, modifikasi kurikulum, dan pendekatan yang lebih personal terhadap siswa. Beberapa sekolah juga berencana untuk mengembangkan kebijakan internal yang mendukung inklusi, seperti pelatihan lebih lanjut bagi guru dan peningkatan fasilitas fisik yang ramah bagi siswa dengan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memotivasi peserta untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah mereka.

## **Manfaat Pengabdian**

Pengabdian di Sekolah Alam Kabupaten Bogor memberikan berbagai manfaat signifikan bagi kelompok sasaran, yaitu guru dan kepala sekolah, serta masyarakat secara luas. Dampak jangka pendek terlihat dari peningkatan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengelola pendidikan inklusif. Mereka menjadi lebih siap dan percaya diri untuk mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang, terutama siswa berkebutuhan khusus. Ini langsung meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi seluruh siswa. Dampak jangka panjang mencakup perubahan kebijakan sekolah yang lebih mendukung inklusi, seperti pelatihan berkelanjutan bagi guru dan peningkatan fasilitas yang ramah bagi siswa disabilitas. Secara sosial, pengabdian ini membantu mempromosikan kesetaraan dan inklusi dalam pendidikan, yang pada akhirnya mengurangi stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Dampak ekonomi juga dapat dirasakan secara tidak langsung, karena siswa dengan kebutuhan khusus yang mendapatkan pendidikan inklusif akan memiliki peluang lebih baik untuk berpartisipasi di masyarakat dan dunia kerja. Secara lingkungan, pengabdian ini mendorong terciptanya sekolah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, baik dari segi sosial maupun fisik, dengan infrastruktur yang mendukung kebutuhan semua siswa.

## **Kendala dan Tantangan**

Selama pelaksanaan pengabdian di Sekolah Alam Kabupaten Bogor, beberapa kendala dan tantangan muncul. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman awal guru dan kepala sekolah tentang pendidikan inklusif. Sebagian besar peserta masih memiliki persepsi bahwa pendidikan inklusif hanya terbatas pada siswa dengan kebutuhan khusus yang terlihat secara fisik, sehingga penerimaan terhadap konsep inklusi penuh perlu waktu. Untuk mengatasi hal ini, materi sosialisasi dirancang secara interaktif, dengan studi kasus nyata dan diskusi kelompok, sehingga peserta lebih mudah memahami konsep inklusi secara menyeluruh. Kendala lain adalah keterbatasan fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan inklusif, seperti aksesibilitas fisik di sekolah dan sumber daya untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus. Mengatasi kendala ini membutuhkan kolaborasi jangka panjang antara sekolah, pemerintah, dan pihak lain untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya secara bertahap. Keterbatasan waktu juga menjadi tantangan, mengingat materi pendidikan inklusif yang kompleks memerlukan waktu yang cukup untuk dikuasai. Solusi sementara yang diterapkan adalah memberikan materi tambahan dalam bentuk modul yang dapat dipelajari secara mandiri oleh para peserta setelah kegiatan selesai.

## **Diskusi**

Hasil dari pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pendidikan inklusif di kalangan guru dan kepala sekolah. Ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelatihan guru secara terfokus dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani siswa

berkebutuhan khusus. Namun, ada beberapa aspek yang menonjol dari pengabdian ini dibandingkan dengan program-program lain. Salah satunya adalah pendekatan khusus yang digunakan, di mana konsep pendidikan inklusif diterapkan dalam konteks sekolah alam, yang memiliki metode pembelajaran berbasis alam dan lebih fleksibel dibandingkan sekolah konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif dapat diterapkan secara adaptif di berbagai model pendidikan, bahkan di sekolah yang menggunakan pendekatan non-formal.

Kontribusi dari hasil pengabdian ini terhadap praktik pendidikan inklusif sangat penting. Pengalaman di Sekolah Alam menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, guru di sekolah non-konvensional juga bisa menjadi agen perubahan dalam mendorong inklusi. Secara teoretis, hasil ini memperkaya ilmu pengetahuan di bidang pendidikan inklusif, khususnya dalam memahami bagaimana inklusi dapat diadaptasi dalam berbagai jenis lingkungan pendidikan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Hasil utama dari pengabdian di Sekolah Alam Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep pendidikan inklusif. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga memicu perubahan sikap dan komitmen peserta untuk menerapkan pendidikan inklusif dalam proses belajar-mengajar. Kontribusi pengabdian ini terhadap masyarakat terlihat dari meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah serta terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan tujuan awal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidikan inklusif, hasil yang dicapai sesuai dengan harapan, mengindikasikan potensi untuk implementasi yang lebih luas di sekolah-sekolah lain.

Implikasi praktis dari hasil pengabdian ini sangat signifikan bagi masyarakat dan institusi terkait. Bagi masyarakat, peningkatan pemahaman tentang pendidikan inklusif mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, di mana semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat belajar dan berkembang dengan baik. Bagi institusi terkait, terutama dinas pendidikan, hasil pengabdian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan dan program pelatihan lebih lanjut untuk guru di seluruh Kabupaten Bogor, serta memperkuat kerjasama dengan sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Dari perspektif pengembangan ilmu pengetahuan, temuan ini menambah literatur mengenai pendidikan inklusif, khususnya dalam konteks sekolah non-konvensional.

Rekomendasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya mencakup peningkatan metodologi dengan manfaatkan teknologi, seperti pelatihan online dan webinar, untuk menjangkau lebih banyak guru di berbagai lokasi. Penguatan kerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sangat penting, sehingga bisa tercipta

komunitas yang mendukung pendidikan inklusif secara berkelanjutan. Selain itu, perluasan dampak pengabdian dapat dilakukan dengan menyelenggarakan workshop lanjutan yang melibatkan orang tua dan siswa, sehingga kesadaran dan pemahaman tentang pendidikan inklusif dapat lebih merata di seluruh komunitas.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini mencakup monitoring dan evaluasi lanjutan untuk menilai penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Alam dan dampaknya terhadap siswa. Tim pengabdian berencana untuk melakukan kunjungan berkala untuk memberikan dukungan teknis dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh guru dalam penerapan materi yang telah diajarkan. Selain itu, pengembangan program yang lebih berkelanjutan perlu direncanakan, seperti pembentukan jaringan guru inklusi di daerah tersebut untuk berbagi praktik baik dan pengalaman, serta mengadakan forum diskusi rutin guna mendukung pertukaran informasi dan strategi dalam pendidikan inklusif.

## Referensi

- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). *Developing Inclusive Schools: How Can We Move Forward?* Education and Training, 50(5), 434-446.
- Arriani, Farah, dkk. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Budiyanto, dkk & TIM MCPM-AIBEO. (2009). Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Wakefield, MA: CAST.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective Teacher Professional Development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Efendi, R. (2005). Guru SLB dan Peranannya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Epstein, J. L. (2018). *School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Giangreco, M.F. (2013). Teacher Assistant Supports in Inclusive Schools: Research, Practices and Alternatives. *Australasian Journal of Special Education*, 37 (2), 93-106.
- Gusti, U. A., & Artha, H. W. (2022). Pengembangan Smart Backgammon sebagai Media Pembelajaran Berbasis Literasi Lingkungan untuk Peserta Didik SD/MI. *Jurnal Pendidikan Dompet Dhuafa*, 12(01), 7-13.
- Gusti, U. A., & Syamsurizal, S. (2021). Analisis urgensi pengembangan booklet pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan kelas XI SMA/MA. *Borneo Journal of Biology Education (BJBE)*, 3(1), 59-66.
- Gusti, U. A., & Syamsurizal, S. (2021). Validity Test of Plant Tissue Structure and Function Booklet for Students in Grade XI Senior High School.

- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Marthan, Lay Kekeh. (2007). Manajemen Pendidikan Inklusif. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009) (Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Rismawati, R., Artha, H. W., & Noviandri, N. (2022). Analisis Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Literasi Lingkungan untuk Peserta Didik Sekolah Dasar. IBERS: Jurnal Pendidikan Indonesia Bermutu, 1(1), 1-7.
- Sukardi, A. (2019). *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Alam: Studi Kasus dan Pendekatan Praktis*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 25(1), 55-66.
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2005). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris: UNESCO.
- Warman, J. S., & Gusti, U. A. (2021). Offline versus Online Learning. Bioeducation Journal, 5(2), 129-136.